

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Jambi memiliki peranan yang sangat penting dalam menegakkan Peraturan Daerah serta menjaga ketertiban masyarakat, terutama terkait dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Meskipun Satpol PP telah berusaha untuk melakukan penertiban melalui surat peringatan dan kegiatan patroli, pelaksanaan tugas mereka masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran dari para PKL untuk mengikuti peraturan yang ada, serta kurangnya solusi dari pihak pemerintah dalam menyediakan lokasi berjualan yang strategis dan menarik. Banyak PKL yang masih melanggar peraturan dan beroperasi di tempat yang dilarang, memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan yang ditetapkan dan keadaan di lapangan.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam mengatur PKL juga mencakup perlawanan yang sering terjadi dari para pedagang saat penertiban dilakukan. Keadaan ini menyebabkan ketegangan antara pihak penegak hukum dan PKL, yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Di samping itu, komunikasi yang tidak efektif antara Satpol PP dan PKL menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi ini. Banyak PKL merasa tidak mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai peraturan yang berlaku, sehingga mereka tidak sepenuhnya sadar akan

konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis serta dialogis untuk membangun camar lebih baik antara Satpol PP dan PKL.

B. Saran

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kota Jambi harus mengambil tindakan nyata dalam menyediakan lebih banyak tempat berjualan yang strategis dan menarik bagi pedagang kaki lima. Selain itu, sangat penting untuk memberikan dukungan berupa pelatihan serta fasilitas yang akan membantu pedagang kaki lima beradaptasi dengan peraturan yang berlaku. Satpol PP juga disarankan untuk meningkatkan cara komunikasi dengan pedagang kaki lima, termasuk menyampaikan informasi dengan lebih baik mengenai peraturan serta konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi. Dibutuhkan sinergi yang lebih baik antara Satpol PP dan lembaga terkait agar penegakan hukum yang dilakukan dapat berlangsung secara konsisten dan efektif, serta untuk mengurangi gesekan antara pedagang kaki lima dan aparat penegak hukum. Dengan cara ini, diharapkan penertiban pedagang kaki lima di Kota Jambi dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan berkelanjutan, sehingga menciptakan suasana yang lebih tertib serta nyaman bagi masyarakat.

